



PUTUSAN

Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Pra

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

xxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Puskesmas Mujur, tempat kediaman di : Dusun Beledu Desa Pengengat Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, sebagai Penggugat;
m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxx, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di : Dusun Tempit Desa Pengengat Kecamatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 08 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dengan Nomor 0033/Pdt.G/2018/PA.Pra, tanggal 08 Januari 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 05 September 2015 di Dusun Tempit Desa Pengengat Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah Ayah Kandung penggugat, maskawin berupa : Uang Rp.591.500,- (Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah) dibayar tunai ; ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan tergugat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh kurang lebih 50 orang diantaranya : H.Nurjaman dan Ky.Irim;
2. Bahwa pada waktu dilaksanakan pernikahan penggugat berstatus Perawan sedangkan tergugat berstatus Jejaka, antara penggugat dengan

Hlm. 1 dari 12 hlm, Put. No. 0033/Pdt.G/2018/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

3. Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam, dan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat, dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut dengan Akta Nikah Nomor : 819 / 11 / IX / 2015 ;
4. Bahwa setelah akad nikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dirumah tergugat di Dusun Tempit Desa Pengengat Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah selama 14 bulan .
5. Bahwa dalam pernikahan penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak (keturunan) ;
6. Bahwa sejak akhir tahun 2016 rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir bathin bagi penggugat antara lain disebabkan oleh :
 - a. Antara penggugat dan tergugat sering terjadi cekcok dan pertengkaran disebabkan oleh tergugat yang sering mabuk.
 - b. Bahwa tergugat jarang sekali memberikan nafkah, baik lahir maupun bathin dan pada bulan Juli 2017 Tergugat menikah lagi.
 - c. Atas kejadian tersebut penggugat sangat kecewa terhadap tergugat dan memutuskan untuk berpisah dan tidak mau lagi membina rumah tangga dengan tergugat ;
7. Bahwa atas keadaan tersebut, penggugat sangat menderita lahir dan bathin serta tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan tergugat dan telah berketetapan hati untuk bercerai dengan tergugat ;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi ;

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;

Hlm. 2 dari 12 hlm, Put. No. 0033/Pdt.G/2018/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 05 September 2015 di lingkungan Tempit Desa Pengengat Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah ;
3. Menjatuhkan talak I (Ba'in Sugra) Penggugat DEWI RATNASARI Binti MASKUR terhadap tergugat WAWAN HIDAYAT Bin MOH.NURHARTAWAN ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan Hukum yang berlaku ;

Subsida : :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk bertindak sebagai wakil atau kuasanya di persidangan meskipun menurut relaas panggilan tanggal 11 Januari 2018 dan 24 Januari 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut maka upaya perdamaian melalui *mediasi* tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya ada perubahan yaitu petitum poin 2 dicabut karena Penggugat telah mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman nomor : 52.057/800/DUKCAPIL/2017 tertanggal 19 September 2017 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk an. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Hlm. 3 dari 12 hlm, Put. No. 0033/Pdt.G/2018/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 819/11/IX/2015 tanggal 07 September 2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 49 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Beledu Desa Pengangat Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Bapak kandung Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 September 2015 di Dusun Tempit, Desa Pengangat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Tempit, Desa Pengangat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak samp[ai sekarang:

Bahwa sepengetahuan saksi bahwa keadaan rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkar[an];

Bahwa perselisihan dan pertengkar[an Penggugat dan Tergugat
Hlm. 4 dari 12 hlm, Put. No. 0033/Pdt.G/2018/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama : Iwin, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan juga karena Tergugat suka mabuk-mabukan;

Bawa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang, karena Penggugat diantar pulang oleh keluarga Tergugat karena sudah diceraikan oleh Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sendiri;

Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi, dan Tergugat tidak pernah lagi memberi bafkah kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga/aparat Dusun/Desa, namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Beledu Desa Pengengat Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Paman Penggugat ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 September 2015 di Dusun Tempit, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Dusun Tempit, Desa Pengengat, Kecamatan Pujut,
Hlm. 5 dari 12 hlm, Put. No. 0033/Pdt.G/2018/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lombok Tengah ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak samp[ai sekarang;

Bahwa sepengetahuan saksi bahwa keadaan rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 6 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama : Iwin, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan juga karena Tergugat suka mabuk-mabukan;

Bawa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 6 bulan yang lalu hingga sekarang, karena Penggugat diantar pulang oleh keluarga Tergugat karena sudah diceraikan oleh Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat sendiri;

Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah ada komunikasi lagi, dan Tergugat tidak pernah lagi memberi bafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga/aparat Dusun/Desa, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada para saksi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

Hlm. 6 dari 12 hlm, Put. No. 0033/Pdt.G/2018/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg., perkara ini harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Tersebut sangat *relevan* (sesuai) dengan kaidah hukum Islam yang Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih kaidah tersebut dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* Juz II hal. 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam tersebut maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidak hadiran Tergugat tersebut menyebabkan gugurnya hak jawab dari Tergugat, sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang berkode P.1 (fotokopy Surat Keterangan Perekaman KTP-el) yang merupakan akta otentik bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili Penggugat yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Praya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. 2 (fotokopy Kutipan Akta

Hlm. 7 dari 12 hlm, Put. No. 0033/Pdt.G/2018/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam secara formil saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat 1 angka 4 dan pasal 175 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai angka 2 sampai 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 5 September 2015 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa, sejak 6 bulan yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama : Iwin, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dan juga karena Tergugat suka mabuk-mabukan;

Hlm. 8 dari 12 hlm, Put. No. 0033/Pdt.G/2018/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada 6 bulan yang lalu tersebut yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat diantar pulang oleh keluarga Tergugat karena sudah diceraikan oleh Tergugat dan sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri;;
4. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan damai baik oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;
3. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat melakukan poligami liar tanpa izin Penggugat, kurang bertanggung jawab masalah nafkah terhadap Penggugat dan suka mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) dan tidak mungkin dapat disatukan kembali dalam ikatan perkawinan bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, maka dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian, maka secara yuridis telah memenuhi alternatif alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hlm. 9 dari 12 hlm, Put. No. 0033/Pdt.G/2018/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan itu pula Majelis hakim mengambil alih pendapat fuqaha' yang tersebut dalam Kitab Al- Iqna juz II halaman 133 yang berbunyi:

والله اعلم
وَاللَّهِ أَحَدُكُمْ رَغْبَةُ الْمَرْجُوَّةِ لِرُجُوِّهَا طَلَقَ عَلَيْهِ الْقَاضِ طَلَقًا

Artinya : *"Dan diwaktu isteri telah memuncak kebencian terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mencerminkan lagi maksud dari pelembagaan perkawinan dalam ajaran Islam, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi *maslahat* (kebaikan) tapi sebaliknya dapat membawa *mafsadat* (keburukan) bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dan Pengadilan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hlm. 10 dari 12 hlm, Put. No. 0033/Pdt.G/2018/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Praya, pada hari Selasa tanggal 06 Februari 2018 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Awal 1439 *Hijriyah*, oleh H. Samad Harianto, S.Ag., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta H. Muhlis, SH. dan Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH. sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta H. Lalu Tiangsa, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

H. Samad Harianto, S.Ag., MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Muhlis, SH.

Hj. Muniroh, S.Ag, SH., MH.

Panitera Pengganti

H. Lalu Tiangsa, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 330.000,- |

Hlm. 11 dari 12 hlm, Put. No. 0033/Pdt.G/2018/PA.Pra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 421.000,-

Hlm. 12 dari 12 hlm, Put. No. 0033/Pdt.G/2018/PA.Pra.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)